

MEMBANGUN VISI POLITIK YANG BERKELANJUTAN UNTUK MASA DEPAN BANGSA

Santi Febri Sari ^{1*}

^{1*} Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Surabaya, Indonesia

santifebris2302@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 2025-09-25

Revised: 2025-10-10

Accepted: 2025-10-25

Keyword:

Sustainable Political Vision;
Political Polarization;
Participatory Democracy;
Collaboration among
Stakeholders.

ABSTRACT (English)

Indonesian national politics in 2025 will be characterized by sharp dynamics due to the polarization of the previous election results, intense political competition between elites and parties, and the spread of disinformation through social media. This research aims to explore the importance of a sustainable political vision for the nation's future and how to develop one that focuses on long-term sustainability and prosperity. This research uses a descriptive qualitative approach using literature review and policy analysis methods. Indonesia needs a long-term political vision to address social disintegration, the environmental crisis, economic injustice, and low political literacy. This vision requires a transformation paradigm that involves all elements of the nation, focusing on the principles of integrity, public participation, social justice, environmental sustainability, and long-term policies. Effective strategies include political education, strengthening democratic institutions, and collaboration between government, civil society, academia, and the business world.

How to Cite:

Sari, S. F. (2025). MEMBANGUN VISI POLITIK YANG BERKELANJUTAN UNTUK MASA DEPAN BANGSA. *Cabinet: Journal of Social, Politics and Government*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/>



<https://doi.org/>

This is an open access article under the CC-BY license



INTRODUCTION

Politik nasional Indonesia pada tahun 2025 akan diwarnai dinamika tajam akibat polarisasi hasil pemilu sebelumnya, persaingan politik yang ketat antar-elit dan partai, serta penyebaran disinformasi melalui media sosial. Polarisasi ini berdampak pada stabilitas demokrasi dan seringkali memperparah segregasi ideologis dalam masyarakat. Pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pertahanan negara di tengah gejolak global, menjaga

netralitas aparatur negara dan lembaga publik dalam kontestasi politik, serta menyerukan sinergi seluruh elemen bangsa untuk mendukung agenda pemerintah dan menjaga stabilitas sosial.

Situasi politik global sedang mengalami kemunduran demokrasi, dengan banyak negara mengalami otokratisasi, termasuk kebangkitan Tiongkok, Rusia, India, dan Iran. Terpilihnya kembali Donald Trump telah memperburuk tren populis dan pergeseran ke arah politik sayap kanan/konservatif serta isolasionisme, yang memberikan tekanan pada demokrasi dan tatanan global. Konflik militer global memperburuk ketidakstabilan politik dan ekonomi global, yang berdampak pada perekonomian nasional Indonesia.

Tantangan tata kelola pemerintahan Indonesia meliputi korupsi, polarisasi politik, rendahnya partisipasi publik, ketimpangan, dan daya saing. Korupsi masih menjadi tantangan utama, dengan Indeks Persepsi Anti-Korupsi (IPAK) tercatat hanya 3,92 pada tahun 2023, turun dari 3,93 pada tahun 2022. Polarisasi politik memicu konflik sosial, mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan mengganggu proses musyawarah publik. Rendahnya partisipasi publik melemahkan pluralisme dan melemahkan demokrasi deliberatif.

Berdasarkan hal itu, lanskap politik nasional dan global saat ini menghadirkan tantangan yang signifikan, termasuk polarisasi politik, korupsi yang belum terselesaikan, rendahnya partisipasi publik, dan tekanan geopolitik-ekonomi. Untuk mengarungi masa penuh gejolak ini, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antar elemen masyarakat, memperdalam komitmennya terhadap demokrasi, serta mendorong transparansi dan partisipasi aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya visi politik yang berkelanjutan bagi masa depan bangsa dan bagaimana mengembangkan visi politik yang berfokus pada keberlanjutan dan kemakmuran jangka panjang.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, termasuk dokumen perundang-undangan, rencana pembangunan nasional dan daerah, hasil penelitian institusi akademik dan lembaga riset seperti LP3ES, serta laporan evaluasi implementasi kebijakan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi urgensi visi politik berkelanjutan, prinsip-prinsip pendukung, dan strategi implementasi di konteks Indonesia. Pendekatan partisipatif juga ditinjau sebagai mekanisme penting dalam mewujudkan visi tersebut melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

RESULT AND DISCUSSION

Urgensi Membangun Visi Politik yang Berkelanjutan

Urgensi membangun visi politik yang berkelanjutan sangat penting dalam menghadapi tantangan nasional seperti disintegrasi sosial, krisis lingkungan,

ketidakadilan ekonomi, dan rendahnya literasi politik. Visi politik jangka panjang sangat penting untuk mengatasi isu-isu ini, karena membantu menavigasi tantangan di masa depan, memitigasi konflik antarkelompok, menciptakan keadilan, dan memastikan pembangunan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pemerintahan.

Politik praktis cenderung berfokus pada kepentingan elektoral jangka pendek, slogan-slogan populis, atau kebijakan instan yang tidak terintegrasi dengan visi pembangunan bangsa yang agung. Visi politik jangka panjang berfungsi sebagai panduan pembangunan nasional, membantu menavigasi tantangan di masa depan, memitigasi konflik antarkelompok, menciptakan keadilan, dan memastikan pembangunan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pemerintahan.

Paradigma transformasi yang komprehensif yang mensyaratkan kolaborasi seluruh elemen bangsa sangat krusial dalam menentukan visi, misi, arah kebijakan, dan indikator pembangunan. Terwujudnya paradigma transformasi ini akan sangat menentukan keberhasilan implementasi visi dan misi pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Visi politik menjadi dasar penetapan prioritas strategis dan transformasi nasional, sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Tanpa visi yang jelas, pembangunan nasional akan terfragmentasi dan seringkali gagal menjawab tantangan-tantangan besar. Visi politik yang berkelanjutan menekankan perlunya pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang simultan dan harmonis, yang mendukung misi bangsa untuk menjadi bangsa yang berkompeten, adil, berdaulat, dan sejahtera secara global.

Pergeseran ini telah menyebabkan krisis legitimasi di lembaga-lembaga pemerintah akibat nepotisme, kurangnya transparansi anggaran, dan hoaks, yang melemahkan kemampuan warga negara untuk membuat keputusan politik yang rasional. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LP3ES) menunjukkan penurunan reformasi politik dan meningkatnya dominasi oligarki, yang menghambat demokrasi dan kesejahteraan. Maraknya dinasti politik di tingkat nasional mengurangi persaingan dan berdampak negatif pada pembangunan daerah.

Krisis politik ini, yang dipadukan dengan krisis ekonomi dan sosial serta disrupsi digital, telah menyebabkan polikrisis. Akademisi didesak untuk turun tangan guna memulihkan nilai-nilai demokrasi yang inklusif, mendemokratisasi kekuasaan, dan meningkatkan literasi politik. Dampak media sosial sebagai ruang

publik digital juga menjadi fokus utama, karena dapat melemahkan demokrasi melalui disinformasi, ujaran kebencian, dan ruang gema.

Demokrasi Indonesia akan tetap dinamis dan adaptif jika mampu mengelola tantangan era digital dengan bijak. Penanganan isu-isu ini membutuhkan kebijakan yang inklusif, transparansi, pendidikan politik, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi untuk memastikan demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial dan berkelanjutan.

Prinsip dan Pilar Visi Politik Berkelanjutan

Visi politik berkelanjutan adalah konsep yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola berkelanjutan. Visi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, menjaga kualitas hidup manusia, memprioritaskan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan, serta menggunakan pendekatan holistik untuk menghubungkan isu-isu ini secara global.

Menurut penelitian (Susi, S., et.al. 2024) Prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pembangunan adalah inti dari penerapan politik berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan harus memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menjamin kelangsungan hidup generasi kini dan mendatang (Daud Silalahi, 2012). Asas kelestarian lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Penelitian (Mulia, S. et.al. 2025) menunjukkan bahwa kebijakan publik dan politik hukum yang inklusif dan partisipatif menjadi fondasi utama bagi pembangunan politik berkelanjutan di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar kebijakan lebih efektif, adil, dan sesuai aspirasi rakyat.

Visi politik berkelanjutan melibatkan lima prinsip:

1. Integritas dan Etika Politik

Politik yang bersih berarti bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Integritas dan etika politik menekankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan untuk membangun kepercayaan publik.

2. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Demokrasi partisipatif mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Ini menjamin suara semua kelompok masyarakat didengar dan diakomodasi, memperkuat legitimasi pemerintahan dan kebijakan yang berkelanjutan.

3. Keadilan dan Inklusivitas

Melibatkan semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, memastikan distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil. Inklusivitas memperkuat kohesi sosial dan mencegah ketimpangan yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan.

4. Berorientasi Lingkungan dan Generasi Mendatang

Politik yang peduli pada isu keberlanjutan ekologis dengan memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Ini mencakup perlindungan sumber daya alam serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

5. Kebijakan Jangka Panjang

Menyusun roadmap atau peta jalan pembangunan politik, ekonomi, dan sosial yang strategis dan berkelanjutan. Kebijakan jangka panjang memastikan konsistensi dan kesinambungan dalam mencapai tujuan pembangunan tanpa terganggu oleh perubahan siklus politik sesaat.

Prinsip-prinsip ini merupakan pilar penting dalam mencapai visi politik berkelanjutan yang adil, transparan, partisipatif, dan ramah lingkungan.

Empat pilar utama visi politik berkelanjutan adalah

1. Pilar Pembangunan Sosial, yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kemitraan strategis, energi bersih dan terjangkau, lapangan kerja yang layak, inovasi, dan infrastruktur berkelanjutan.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan menjaga pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, menekankan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan generasi mendatang.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola berfokus pada penciptaan kepastian hukum, tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif, peningkatan stabilitas keamanan, peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan dukungan terhadap lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan keadilan.

Visi politik berkelanjutan bertujuan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta lingkungan yang terlindungi untuk generasi mendatang melalui pemerintahan yang baik dan adil.

Strategi Membangun Visi Politik yang Berkelanjutan

Visi politik berkelanjutan adalah pendekatan strategis yang berfokus pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini melibatkan pemahaman konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengintegrasikan pilar-pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan kebutuhan generasi mendatang tidak terganggu. Partisipasi dan keterlibatan publik sangat penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan visi tersebut, yang memungkinkan terciptanya dialog dan pemberdayaan. Tata kelola yang baik dan transparan sangat penting bagi visi politik berkelanjutan, membangun kepercayaan publik, dan mendukung tujuan politik jangka panjang.

Pendidikan politik yang berkelanjutan membangun kapasitas kader dan pemimpin politik untuk memahami tantangan pembangunan berkelanjutan dan menerjemahkan visi tersebut ke dalam program-program konkret. Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan, seperti kebijakan ramah lingkungan dan pengurangan kesenjangan sosial, sangat penting. Visi politik berkelanjutan harus memiliki target dan tujuan jangka panjang yang jelas, dengan indikator keberhasilan yang terukur.

Integritas dan komitmen politik sangat penting bagi para pemimpin politik untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap visi berkelanjutan. Contoh penerapan visi politik berkelanjutan adalah mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan konservasi lingkungan dan pengentasan kemiskinan, sebagaimana dicontohkan dalam program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan global dan kebijakan nasional. Strategi ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, partai politik, dan sektor swasta untuk memastikan visi politik berkelanjutan terwujud dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan lingkungan di masa depan.

Pentingnya pendidikan politik sejak dini, penguatan lembaga demokrasi dan hukum, serta promosi kepemimpinan visioner. penelitian ini menyoroti peran partai politik dalam merumuskan visi nasional yang konsisten, pengembangan kader, dan pendidikan politik internal untuk mengembangkan kepemimpinan yang visioner dan berdedikasi. Penelitian ini juga menekankan perlunya partai politik memprioritaskan demokrasi substantif, bukan hanya demokrasi elektoral.

penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar elemen nasional seperti pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha. Ruang terbuka

untuk dialog dan kemitraan sinergis sangat penting untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan. Peran akademisi dalam penelitian dan pendidikan politik, dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial dan penggerak partisipasi publik juga krusial.

Strategi-strategi ini saling mendukung dalam menciptakan sistem politik yang kuat, demokratis, dan berkelanjutan di Indonesia, yang selaras dengan tantangan dan karakteristik bangsa. Penguatan demokrasi tidak hanya melibatkan proses elektoral tetapi juga kualitas kelembagaan dan partisipasi aktif warga negara dalam kerangka nilai-nilai Pancasila.

Implementasi dalam Konteks Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan visi politik berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah, menyelaraskannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mencakup periode 2025-2045. Agenda Nawacita pemerintahan Jokowi, yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, menggabungkan TPB, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan manusia, ekonomi hijau, dan pengurangan ketimpangan sosial. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 mengatur peta jalan, rencana aksi, pendanaan, dan kerangka kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan.

Contoh lokalnya adalah Ibu Kota Negara (IKN), yang memprioritaskan prinsip-prinsip kota berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui proyek-proyek penghijauan, reboisasi, dan pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan. Keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, akademisi, dan organisasi internasional, sangat penting untuk mewujudkan visi berkelanjutan tersebut.

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan melalui laporan khusus, seperti Tinjauan Lokal Sukarela (Voluntary Local Review), untuk menilai kemajuan pencapaian TPB dan mengadaptasi kebijakan secara responsif. Namun, tantangan utamanya tetaplah perlunya reformasi sistem politik dan kepartaian untuk mendukung komitmen politik hijau dan agenda keberlanjutan yang lebih mendalam. Pendidikan politik ekologis, reformasi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memperkuat implementasi visi politik berkelanjutan di masa depan.

CONCLUSION

Indonesia membutuhkan visi politik yang berkelanjutan untuk mengatasi krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan serta disrupsi digital. Visi ini mensyaratkan

paradigma transformasi yang melibatkan seluruh elemen bangsa, dengan fokus pada prinsip-prinsip integritas, partisipasi publik, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kebijakan jangka panjang. Strategi yang efektif mencakup pendidikan politik, penguatan lembaga demokrasi, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha. Politik saat ini terlalu berfokus pada kepentingan jangka pendek dan populisme, sehingga membutuhkan visi yang berkelanjutan untuk memandu pembangunan nasional. Prinsip-prinsip kunci meliputi integritas politik, partisipasi publik, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kebijakan jangka panjang yang konsisten. Implementasi yang sukses membutuhkan kolaborasi antar elemen bangsa dan sinergi lintas sektor. Contohnya adalah perencanaan ibu kota Indonesia, yang mengintegrasikan kebijakan nasional dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

REFERENCES

- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729-738.
- Irwandi, M. D., Akbar, R., & Santa, R. (2023). Analisis Kesadaran Generasi Muda Indonesia Dalam Dunia Politik. *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)*, 2(1), 107-116.
- Maulidah, N., Saepudin, E. A., Edista, L., Damayanti, A. S., Afnia, S. N., & Nabawi, M. L. (2025). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Visioner Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 227-233.
- Mulia, S. S., Fadhila, R., Zahida, K. A., & Wijanarko, T. (2025). Di Antara Mimpi dan Aksi: Langkah Nyata Generasi Muda dalam Dinamika Pembangunan Sosial Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(4), 14-14.
- Mulyadi, M., Satino, S., & Surahmad, S. (2024, July). Bela Negara, Politik dan Demokrasi di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 6, No. 1, pp. 82-93).
- Susi, S., Khair, O. I., Firmansyah, J. P., Salman, A., & Raharjo, J. S. (2024). Kepemimpinan Nasional yang Berjiwa Pancasila: Investasi Masa Depan Bangsa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), 695-703.
- Yuhana, A. (2024). PERANAN HALUAN NEGARA DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *LITIGASI*, 25(2), 331-358.